

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, PT Prenadamedia Group, Depok, 2018
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradyna Paramita, Jakarta, 2011.
- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Dan Hakim Ad Hoc*, Papas Sinar Sinanti Ikapi, Jakarta, 2016
- M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Richard C. Schroeder, *Garis Besar Pemetintahan Amerika Serikat*, Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negri Amerika Serikat, direvisi dan diperbarui tahun 2000 oleh Rosali Targonski, Robert L. Taylor, dkk.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta

Widodo, *Metodologi Penelitian (Populer dan Praktis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Yahya Harahap, *Pembahasan Pemeriksaan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen; Dinamika perkembangan Urgensi Penataannya kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

C. WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21498/luhut-mp-pangaribuan-pengadilan-kita-perlu-mengenal-ilay-participation/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia; Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, *Kepaniteraan Pidana; Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana*, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>.

Nevrina Hastuti, *Eksistensi Sistem Juri Dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat*, Kantor Wilayah Jawa Barat; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://jabar.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/eksistensi-sistem-juri-dalam-sistem-peradilan-pidana-amerika-serikat>.

Ramadhan, *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia Dalam Penemuan Pembentukan Hukum*, hal. 220 - 221, <https://www.coursehero.com › file › 31169-97753-3-PBpdf>.

Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, “*Transplantasi Sistem Peradilan Jury Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol.V No.1, Januari-juni 2017, <https://jurnal.uns.ac.id › article>.

The Constitution of The United States, <https://www.usconstitution.net/const.pdf>.

